

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Negeri Gorontalo untuk menelusuri nilai-nilai pluralisme dalam ruang publik siswa di sekolah. obyek dalam penelitian ini adalah siswa di SMA 1 Negeri Gorontalo berasal dari berbagai kelompok agama yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, dan Budha yang masing-masing kelompok berbeda itu hidup saling hormat-menghormati dan toleransi baik antara guru dengan murid, dan murid dengan murid lain yang memiliki keyakinan berbeda dalam hal ini agama. Adapun Kelompok siswa yang berbeda agama tersebut oleh sekolah diberi kebebasan untuk beraktualisasi sesuai dengan identitas kebudayaan masing-masing. Upaya penanaman nilai-pluralisme dilaksanakan oleh para guru terutama guru-guru yang mengampu mata pelajaran yang termasuk dalam kategori ilmu sosial seperti bahasa Indonesia dan sosiologi serta guru agama yang mengajarkan tentang nilai-nilai inklusif berdasarkan ajaran masing-masing agama. Penanaman nilai-nilai pluralisme juga dilaksanakan melalui berbagai aktivitas organisasi kesiswaan dan kegiatan keagamaan yang kepanitiaannya bersifat gabungan lintas agama. Pemilihan pengurus OSIS di semua sekolah yang menjadi obyek penelitian, berlangsung secara demokratis, seperti yang dikatakan oleh Amel beragama Islam. “pemilihan ketua OSIS itu harus terbuka, ikuti oleh seluruh siswa, biar dari agama apapun” Selanjutnya, menurut Andreas siswa yang berasal dari agama

Kristen mengatakan bahwa: “Demokrasi itu hak yang diberikan kepada kami untuk memilih, karena Tuhan menghormati hak asasi manusia”. Selanjutnya demokrasi menurut pandangan Ni Wayan Astuti salah seorang siswa yang beragama hindu mengenai demokrasi “demokrasi adalah nilai, kami manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Dalam agama kami disebut Istadewata. Kemudian demokrasi menurut Accha salah seorang yang beragama Budha adalah “demokrasi itu kebebasan, toleransi, tentang agama masing-masing, Berdasarkan pandangan siswa mengenai demokrasi dari berbagai agama baik agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, memiliki pemahaman satu mengenai demokrasi yaitu suatu “kebebasan dan toleransi” dimana kebebasan dalam menganut agama, islam dan agama budaya mengakui adanya hak individu atau kelompok dalam menganut agama berdasarkan kepercayaan tanpa adanya unsure paksaan dan diskriminasi dalam menganut agama, disamping itu sikap toleransi dalam beragama pun diperlukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, jauh dari konflik. Contohnya di lingkungan sekolah, dalam pemilihan ketua OSIS seluruh siswa diwajibkan ikut serta dalam proses pemilihan yang bersifat demokratis tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Karena dalam pandangan demokrasi seluruh siswa dianggap sama, tidak ada perbedaan dalam segi strata, agama, social dan budaya. Hal ini merupakan bentuk nilai pluralism dalam lingkup sekolah.

Ruang publik adalah lokus utama pluralisme kewargaan, karena ia adalah tempat pertemuan beragam individu dan kelompok yang berbeda. Dalam beberapa waktu terakhir sering terdengar suara miring mengenai

dominasi ruang publik siswa di sekolah-sekolah menengah umum negeri oleh kelompok dengan cara pandang keagamaan tertentu. Kecenderungan ini disinyalir cukup luas terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sinyalemen ini biasanya juga disertai dengan ungkapan kekhawatiran tentang terjadinya pengkotak-kotakan siswa berdasarkan identitas keagamaan melampaui identitas keindonesiaan yang bisa mengancam nilai-nilai “pluralisme kewargaan” yang merupakan fondasi bagi Indonesia sebagai rumah bersama. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena sekolah umum negeri yang dibiayai negara semestinya merupakan ruang bersama yang mengakomodasi semua ekspresi keragaman apa pun latarbelakang agama, etnis dan budaya siswa dan sekaligus menjadi arena belajar siswa dalam mengelola keragaman tersebut. Riset ini melihat lebih dalam praktik dominasi ruang publik di sekolah-sekolah umum, yang secara khusus memberikan perhatian terhadap praktik berislam di ruang publik sekolah, yang pada tingkat tertentu bisa menimbulkan dominasi dan diskriminasi atas pola dan jenis berislam yang lain. Pada sisi lain, riset ini juga mengeksplorasi pola-pola yang diinisiasi siswa (resepsi, negosiasi dan resistensi) terhadap dominasi tersebut.

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multikultural yang efektif. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai,

saling memahami, mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan diantara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11). Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.

Pluralitas agama di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Format pluralitas yang menguat melalui proses sejarah dengan berbagai dimensinya dipahami mempunyai keunikan jika dibanding dengan pluralitas yang terjadi di negara-negara lain. Atas dasar pluralitas itu, maka Indonesia tidak mengambil bentuk "negara agama" yang mendasarkan diri pada agama tertentu. Ia juga tidak mengambil bentuk "negara sekuler" yang memisahkan agama dari urusan negara Indonesia membentuk diri sebagai "negara Pancasila". Ia bukan

negara agama, bukan pula negara sekuler. Di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menurut Ahmad Sukardja, "negara tidak identik dengan agama tertentu, tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara". Membangun masyarakat yang demokratis bagi Indonesia merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis dan multikultural. Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia.

Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pangakuan terhadap hal tersebut. Namun mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme di dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk budayanya.

upaya satu kelompok untuk mewarnai bahkan mendominasi ruang publik itu, hingga pada kemungkinan diskriminasi, tapi juga upaya perlawanan dari individu atau kelompok lain, dan negosiasi antarkelompok di dalamnya. Sebagian dari tugas pemerintah dan pemimpin sekolah adalah membentuk dan menjaga ruang publik sekolah yang bebas dan terbuka, yang memberi ruang semua siswa dalam posisi setara sebagai warga negara. Inilah ruang

yang penting sebagai arena bersama untuk belajar menghormati dan mengelola keberagaman.

Penelitian ini dilakukan di SMA 1 Negeri Gorontalo untuk melihat praktik nilai-nilai pluralisme dan dampaknya terhadap ruang publik siswa di sekolah, serta melihat keberadaan ruang yang diberikan serta bagaimana menyikapi dominasi ruang publik, di mana ruang publik masih didominasi oleh agama Islam.

Praktik-praktik resistensi merupakan satu contoh pembelajaran pluralisme, yaitu dalam membangun ruang publik yang lebih terbuka, sehat, dan demokratis. Implikasinya, sekolah sebagai ruang publik yang bebas untuk semua golongan siswa, kini hendak dan sebagian telah ditafsirkan dan dibentuk berdasarkan paham dan kepentingan satu golongan saja. Para siswa Muslim yang berpandangan berbeda dan tidak ingin menyatakan ekspresi keagamaan mereka secara formal amat mungkin tidak nyaman dengan kecenderungan ini. Demikian pula dengan para siswa non-Muslim. Berdasarkan latarbelakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul **“Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Ruang Publik Sekolah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana nilai-nilai pluralisme dalam ruang publik sekolah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Pluralisme yang ada dalam ruang publik sekolah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teorisnya adalah penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para guru untuk mengetahui nilai-nilai Pluralisme yang ada dalam ruang publik sekolah.
2. Manfaat Praktiknya adalah penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para guru dalam memahami nilai-nilai Pluralisme dalam ruang publik sekolah